

Pengaruh Upah Minimum terhadap Ketimpangan dan Kemiskinan di Pulau Jawa

Ia Haerunisa^{1*}, Assyifa Eka Nabila²

¹⁻²Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Email: iakhoirunnisa@gmail.com^{1*}, assyifanabila88@gmail.com²

*Korespondensi penulis: iakhoirunnisa@gmail.com

Abstract. *Income inequality and poverty continue to be major challenges in Indonesia's industrial areas, especially in DKI Jakarta, West Java, and Banten, although minimum wage policies continue to be developed as a form of protection for low-income workers. These policies theoretically serve as an instrument for income redistribution and improvement of labor welfare, but their effectiveness in reducing inequality and reducing poverty rates is still questionable, especially in areas with highly industrialized economic structures. This study aims to analyze the influence of income inequality, poverty rate, economic growth, and unemployment rate on the dynamics of the provincial minimum wage in the 2016–2023 period. The study used secondary data obtained from the Central Statistics Agency and analyzed using panel data regression to obtain a comprehensive empirical picture of the factors determining the minimum wage. The test results show that the Fixed Effect Model is the most suitable model for capturing variations between provinces and between times. Key findings reveal that poverty levels and economic growth have a significant influence on changes in the minimum wage, while income inequality and unemployment rates have no significant influence. The conclusion of the study emphasizes that the minimum wage policy is not effective enough in reducing income inequality and reducing poverty without the expansion of the formal sector, improving the quality of the workforce, and distributing economic growth more evenly between industrial areas.*

Keywords: *Economic Growth; Income Inequality; Minimum Wage; Poverty; Unemployment.*

Abstrak. Ketimpangan pendapatan dan kemiskinan masih terus menjadi tantangan utama di wilayah industri Indonesia, khususnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, meskipun kebijakan upah minimum terus dikembangkan sebagai bentuk perlindungan terhadap pekerja berpendapatan rendah. Kebijakan ini secara teoritis berfungsi sebagai instrumen redistribusi pendapatan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, namun efektivitasnya dalam mereduksi kesenjangan dan menurunkan tingkat kemiskinan masih dipertanyakan, terutama di wilayah dengan struktur ekonomi yang sangat padat industri. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh ketimpangan pendapatan, tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran terhadap dinamika upah minimum provinsi pada periode 2016–2023. Studi ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan dianalisis menggunakan regresi data panel untuk memperoleh gambaran empiris yang komprehensif mengenai faktor-faktor penentu upah minimum. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Fixed Effect Model merupakan model yang paling sesuai untuk menangkap variasi antarprovinsi dan antarwaktu. Temuan utama mengungkapkan bahwa tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh signifikan terhadap perubahan upah minimum, sedangkan ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa kebijakan upah minimum belum cukup efektif dalam menekan ketimpangan pendapatan maupun mengurangi kemiskinan tanpa disertai perluasan sektor formal, peningkatan kualitas tenaga kerja, serta pemerataan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata antarwilayah industri.

Kata kunci: Kemiskinan; Ketidaksetaraan Pendapatan; Pengangguran; Pertumbuhan Ekonomi; Upah Minimum.

1. LATAR BELAKANG

Ketimpangan dapat diartikan sebagai bentuk ketidakmerataan baik dari segi pendapatan, akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, serta peluang untuk mendapatkan pekerjaan. Kesenjangan fasilitas antara wilayah perkotaan dan pedesaan cukup kontras dimana wilayah perkotaan mendapatkan akses dan layanan yang lebih baik dan berkualitas yang akhirnya memperparah kesenjangan antarwilayah (Report et al., 2021) Akses pekerjaan dan

distribusi pendapatan yang tidak merata dapat mengurangi laju pertumbuhan ekonomi terutama ketika pangsa pasar sektor informal rendah (Ilmiah, 2015) Menurut (Priseptian & Primandhana, 2022) upah minimum berpengaruh secara negatif terhadap kemiskinan, artinya kebijakan ini dapat menjadi mekanisme pencegahan upah pekerja jatuh dibawah level rata-rata.

Kebijakan Upah Minimum merupakan salah satu instrumen penting untuk menjaga kesejahteraan pekerja dan mengurangi ketimpangan pendapatan di negara berkembang. Menurut (Cunningham, n.d.) Upah minimum ditetapkan sebagai alat penanggulangan terhadap kemiskinan dan keadilan sosial yang menargetkan pekerja pada lapisan bawah distribusi pendapatan dengan mengedepankan dua tujuan utama, yaitu upah yang adil bagi pekerja dan jaminan pendapatan yang dapat mempertahankan standar hidup minimum terlepas dari apapun pekerjaannya. Pada kenyataannya, kebijakan ini tidak berdampak signifikan terhadap ketimpangan dan kemiskinan karena pendistribusian pendapatan yang tidak merata pada beberapa wilayah dan kelompok kerja. Meskipun di Indonesia sendiri sudah diatur dalam Permenaker No. 1 Tahun 1999 tentang Upah Minimum, pada praktiknya masih banyak ditemukan pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut dimana perjanjian kerja sering kali dibuat secara sepihak oleh pengusaha tanpa mempertimbangkan kepentingan pekerja, sehingga menyebabkan posisi pekerja menjadi lemah dan upah yang diterima tidak sesuai dengan standar minimum yang telah ditetapkan (S et al., 2024).

Ketimpangan dan kemiskinan telah lama menjadi isu utama dalam pembangunan perekonomian di Indonesia, dimana beberapa provinsi menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup nyata dengan variasi yang cukup besar. (Conference & Geneva, 2009) sejak tahun 2015 angka Gini ratio terus mengalami penurunan sejak tahun 2013 hingga 2019 namun mengalami peningkatan sejak tahun 2020 sebesar 0,409 di tahun 2023. Indeks gini untuk pedesaan sebaliknya, mengalami penurunan sejak sebesar 0,021 persen dari tahun 2015-2023.

Kebijakan upah minimum sudah lama diatur di Indonesia dengan mekanisme Upah Minimum Provinsi (UMP) serta Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Berdasarkan data statistik resmi, adanya ketimpangan ini menjadikan adanya dinamika upah dan distribusi pendapatan memengaruhi kesejahteraan masyarakat secara regional, tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2016 sebesar 10,7% dan di tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 9,36%, namun sebaliknya gini rasio menunjukkan bahwa ketimpangan relatif tinggi yang berada di kisaran 0,38 secara nasional yang mengindikasikan bahwa ketimpangan belum sepenuhnya teratasi (Conference & Geneva, 2009) Adapun efektivitas upah minimum dalam menekan ketimpangan pendapatan dan kemiskinan masih menjadi perdebatan di berbagai negara berkembang, dikutip dalam (Bernstein et al., 2006) meskipun upah minimum dapat

menaikkan pendapatan pekerja berupah rendah, hal ini dapat berpotensi menekan kesempatan kerja bagi kelompok remaja dan pekerja berketerampilan rendah.

Penelitian ini mengkaji tiga provinsi dengan tingkat urbanisasi dan produktivitas tenaga kerja tertinggi di Indonesia, yaitu provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Ketiga provinsi ini memiliki tingkat pendapatan upah yang relatif tinggi dibandingkan wilayah lain dengan kenaikan setiap tahunnya seperti provinsi DKI Jakarta dengan UMP sebesar Rp4.901.798,00 di tahun 2023 (Conference & Geneva, 2009) Berdasarkan hasil penelitian (Rohmah & Sastiono, 2021) kebijakan kenaikan UMP di wilayah industri padat seperti Jawa Barat dan Banten hanya berdampak signifikan pada sektor formal, sedangkan pekerja sektor informal tidak merasakan manfaat yang sama. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dan hasil yang dicapai dalam distribusi pendapatan, kebijakan upah minimum dapat meningkatkan pendapatan pekerja sektor formal secara efektif selama tidak memengaruhi tingkat penyerapan tenaga kerja. Sejalan dengan temuan (Perwira & Stokes, 2001) bahwa kenaikan upah minimum terutama pada pertumbuhan ekonomi yang rendah seperti di Indonesia justru berdampak buruk bagi sektor non formal.

Kondisi makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran juga memengaruhi ketimpangan pendapatan dan tingkat kemiskinan, seperti halnya Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), kenaikan PDRB mengindikasikan peningkatan kapasitas jumlah produksi sehingga berpeluang menyerap tenaga kerja lebih banyak (Muslim, 2014) Menurut (*Inequality and Growth in a Panel of Countries** Robert J. Barro, Harvard University June 1999, 1999) ketimpangan berpotensi menghambat pertumbuhan di negara berpendapatan rendah, sementara di negara kaya dampaknya lebih positif terhadap ekspansi ekonomi. Di Indonesia khususnya di provinsi industri seperti DKI Jakarta(4,96%), Jawa Barat (5,00%), dan Banten (4,81%) mengindikasikan pola pemerataan yang membaik dari tahun sebelumnya terutama pasca pandemi. Kebijakan ini dapat dikatakan relevan dan kuat terutama bagi negara berkembang untuk mendorong pembangunan ekonomi.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memiliki hubungan erat dengan kemiskinan, tingginya angka pengangguran mencerminkan rendahnya penyerapan tenaga kerja dimana peningkatan jumlah pengangguran menekan pendapatan masyarakat dan kesejahteraan sosial. Menurut (Muslim, 2014) peningkatan jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja akan menimbulkan peningkatan jumlah pengangguran dan menurunkan aktivitas perekonomian secara langsung. Tahun 2020 menjadi puncak lonjakan pengangguran di ketiga provinsi yang mengakibatkan perlambatan ekonomi dengan DKI Jakarta sebagai provinsi paling terdampak sebesar 11% (Conference & Geneva, 2009).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap ketimpangan dan tingkat kemiskinan di tiga provinsi industri di Indonesia, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat. Dan Banten pada periode 2016-2023. Relevansi penelitian ini didukung oleh temuan (Report et al., 2021) yang menunjukkan bahwa perluasan lapangan kerja formal dan peningkatan pekerjaan upahan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan kelompok berpenghasilan menengah di Indonesia. Dengan demikian, peningkatan upah minimum yang selaras dengan produktivitas di sektor formal maupun informal berpotensi menjadi instrumen penting dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, kebijakan pengupahan yang berkeadilan diharapkan mampu mendorong transformasi struktural dan mobilitas pekerja menuju sektor-sektor yang lebih produktif, sehingga pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kemiskinan dan mempersempit kesenjangan ekonomi di wilayah industri utama tersebut (Priseptian & Primandhana, 2022).

2. KAJIAN TEORITIS

Upah Minimum

Menurut International Labour Organization (ILO) (Conference & Geneva, 2009), upah minimum adalah jumlah imbalan paling rendah yang wajib dibayarkan pemberi kerja kepada pekerja atas pekerjaan yang dilakukan dalam suatu periode tertentu sebagai bentuk perlindungan bagi pekerja berupah rendah. Definisi ini penting karena teori upah klasik dari David Ricardo dalam *The Principles Of Political Economy And Taxation* menunjukkan bahwa mekanisme pasar cenderung mendorong upah kembali ke tingkat subsisten melalui penyesuaian jumlah tenaga kerja. Karl Marx memperkuat pandangan tersebut dengan menjelaskan bahwa pekerja sering menerima upah jauh di bawah nilai kerja yang mereka hasilkan, sehingga akumulasi modal memperbesar ketimpangan. W.A. Lewis menambahkan bahwa dalam kondisi surplus tenaga kerja, perkembangan sektor modern tidak otomatis menaikkan upah riil karena perusahaan dapat terus merekrut pekerja pada upah rendah. Dengan demikian, kebijakan upah minimum menjadi intervensi penting untuk memutus kecenderungan stagnasi upah dan memastikan pekerja memperoleh pendapatan dasar yang layak.

Ketimpangan (Gini Ratio)

Secara metodologis, pengukuran ketimpangan pendapatan dalam penelitian ini berlandaskan pada dua karya pionir, yaitu Kurva Lorenz (*Methods of Measuring the Concentration of Wealth* Author (s): M . O . Lorenz Published by : Taylor & Francis , Ltd . on Behalf of the American Statistical Association AMERICAN STATISTICAL ASSOCIATION

., 1905) yang menggambarkan distribusi pendapatan secara visual, dan Koefisien Gini (Society, 1921) yang memberikan pengukuran kuantitatifnya. (Society, 1921) dalam karyanya menjelaskan bahwa koefisien ini pada dasarnya mengukur rasio konsentrasi yang diturunkan dari mean difference (selisih rata-rata) dan berkaitan langsung dengan area antara Kurva Lorenz dan garis kesetaraan sempurna, yaitu pemetaan distribusi pendapatan yang merata dimana semakin jauh kurva tersebut dari garis kesetaraan, semakin tinggi tingkat ketimpangan pendapatan di suatu negara atau wilayah. Hal tersebut kemudian menjadi indikator untuk melihat efektivitas kebijakan Upah Minimum (UMP) dalam mendorong distribusi pendapatan yang lebih merata.

Kemiskinan

Berdasarkan (García-gómez et al., 2025) kemiskinan didefinisikan sebagai suatu kondisi multidimensi dimana individu atau rumah tangga mengalami deprivasi yang saling berkaitan secara simultan dalam tiga dimensi utama, yaitu pendapatan, pemenuhan kebutuhan material, dan intensitas kerja yang menekankan pada fenomena clustering of deprivations, yaitu kecenderungan deprivasi dalam satu dimensi untuk memperburuk kondisi deprivasi pada dimensi lainnya, sehingga menciptakan lingkaran kemiskinan yang kompleks. Hal ini sejalan dengan perspektif Emmanuel Jimenez dalam (Jimenez, 2015) tentang pentingnya menciptakan pekerjaan yang produktif dan inklusif menjadi sangat relevan, karena pekerjaan yang baik tidak hanya langsung menangani dimensi pendapatan dan intensitas kerja, tetapi juga membuka akses untuk memenuhi kebutuhan material, sehingga mendeklarusterisasi deprivasi.

Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)

Kajian tentang pertumbuhan ekonomi daerah biasanya mengacu pada model pertumbuhan (Solow et al., 2007) yang menjelaskan bahwa output suatu wilayah dipengaruhi oleh akumulasi modal, tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Dalam konteks pembangunan regional, (*Linked References Are Available on JSTOR for This Article* :, 1955) menunjukkan bahwa pertumbuhan awal sering disertai perubahan struktur ekonomi yang dapat memengaruhi ketimpangan pendapatan antarwilayah. PDRB kemudian menjadi indikator penting untuk membaca kapasitas produksi dan tingkat aktivitas ekonomi suatu daerah, sehingga sering digunakan sebagai variabel kontrol dalam penelitian sosial-ekonomi. Meskipun dikritik dalam laporan OECD (Stone, 2019) meskipun memiliki kekurangan sebagai ukuran keberhasilan yang komprehensif, PDB (dan turunannya seperti PDRB) tetap menjadi proksi utama yang diandalkan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Berdasarkan standar (Conference & Geneva, 2009), konsep pengangguran secara internasional didefinisikan melalui tiga kriteria ketat, yaitu sedang tidak bekerja, aktif mencari pekerjaan dalam 4 minggu terakhir, dan siap bekerja dalam 2 minggu ke depan. Namun definisi ini dinilai terlalu sempit karena tidak mencakup pekerja paruh waktu yang ingin bekerja lebih lama atau orang yang putus asa mencari kerja, (Society, 2005) menyatakan dukungan untuk sistem ketenagakerjaan yang serikat pekerjaanya kuat justru muncul ketika ketimpangan gaji antar pekerja itu sangat rendah atau sangat tinggi. Sementara itu, penelitian (Plosser & Schwert, 1979) menunjukkan bahwa hubungan statistik antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi (Okun's Law) sering disalahtafsirkan, sehingga dapat mengarah pada kebijakan yang kurang tepat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan pendekatan analisis regresi data panel. Metode kuantitatif dipilih karena mampu memberikan gambaran empiris mengenai hubungan antarvariabel secara terukur berdasarkan data statistik. Penggunaan regresi data panel dinilai lebih akurat dibandingkan regresi cross section atau time series secara terpisah karena menggabungkan dimensi waktu dan lintas wilayah sehingga menghasilkan estimasi lebih baik dan informatif (Studi et al., 2020)

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dalam periode tahun 2016–2023. Unit analisis penelitian mencakup tiga provinsi dengan basis industri utama di Pulau Jawa, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi laporan statistik dan publikasi tahunan BPS. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP), variabel independen yaitu Gini Rasio dan Tingkat Kemiskinan, serta variabel kontrol yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pemilihan variabel ini berdasarkan kajian sebelumnya yang menunjukkan bahwa faktor ketimpangan pendapatan, kemiskinan, dan indikator ekonomi makro berkorelasi dengan kebijakan upah (Wulandari, 2017)

Teknik analisis data menggunakan regresi data panel dengan tiga kemungkinan pendekatan model yaitu Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM). Penentuan model terbaik dilakukan melalui Uji Chow untuk memilih antara CEM dan FEM, serta Uji Hausman untuk memilih antara FEM atau REM. Jika Uji Chow menunjukkan FEM namun Uji Hausman memilih REM, maka dilakukan Uji

Lagrange Multiplier (LM) untuk menentukan model paling tepat. Setelah model terbaik dipilih, dilakukan uji hipotesis menggunakan uji koefisien determinasi (R^2), uji F, dan uji t, serta serangkaian uji asumsi klasik meliputi uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji multikolinearitas guna memastikan kelayakan model.

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: (H1) Gini Rasio berpengaruh signifikan terhadap UMP; (H2) Tingkat Kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap UMP; (H3) PDRB berpengaruh signifikan terhadap UMP; dan (H4) Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh signifikan terhadap UMP.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pengumpulan Data, Rentang Waktu, dan Lokasi Penelitian

Data penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan menggunakan tiga provinsi di pulau jawa DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten sebagai cross-section dengan rentang waktu 2016-2023 sebagai time series. Analisis dilakukan dengan regresi data panel menggunakan variabel independen Upah Minimum Provinsi (UMP), variabel dependen Indeks Gini dan tingkat kemiskinan, serta variabel kontrol berupa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Model dianalisis menggunakan pendekatan Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM).

Hasil Analisis Regresi Data Panel

Estimasi Common Effect Model (CEM)

Tabel 1. Estimasi koefisien common effect model (CEM).

Variabel	koefisien	Standar Error	t-statistik	probabilitas
constant	9091519	4156762	2.19	0.041
Indeks Gini	-1.48e+07	1.14e+07	-1.30	0.211
kemiskinan	-342932.4	81676.28	-4.20	0.000
PDRB	0.8205785	0.2420179	3.39	0.003
TPT	1043.142	90740	0.01	0.991

Sumber: BPS, diolah peneliti menggunakan STATA (2025).

Hasil estimasi CEM menunjukkan bahwa Indeks Gini memiliki koefisien negatif sangat besar, yaitu $-1,48 \times 10^7$, yang mengindikasikan bahwa peningkatan ketimpangan pendapatan cenderung menurunkan UMP. Namun, signifikansi yang rendah menunjukkan bahwa ketimpangan tidak memberikan pengaruh yang kuat terhadap penetapan upah minimum. Sebaliknya, variabel kemiskinan memiliki pengaruh negatif yang signifikan dengan koefisien $-342.932,4$, sehingga semakin tinggi tingkat kemiskinan, UMP justru semakin rendah. Temuan

ini konsisten dengan teori pasar tenaga kerja yang menyatakan bahwa daerah dengan beban sosial ekonomi tinggi cenderung menetapkan upah minimum lebih konservatif. PDRB berpengaruh positif signifikan, menunjukkan bahwa kondisi ekonomi daerah menjadi salah satu faktor kunci penetapan UMP. TPT memiliki arah positif tetapi tidak signifikan, yang berarti pengangguran tidak memengaruhi besar kecilnya UMP dalam model CEM.

Estimasi Fixed Effect Model (FEM)

Tabel 2. Estimasi koefisien Fixed Effect Model (FEM).

Variabel	koefisien	Standar Error	t-statistik	probabilitas
constant	906965.8	1887145	0.48	0.637
Indeks Gini	-5295861	4752410	-1.11	0.281
kemiskinan	362784.4	84251.95	4.31	0.000
PDRB	1.033374	0.1749187	5.91	0.000
TPT	-21778.94	37596.44	-0.58	0.570

Sumber: BPS, diolah peneliti menggunakan STATA (2025).

Model FEM menghasilkan hubungan yang lebih stabil antarvariabel, mengingat perbedaan karakteristik provinsi dimasukkan sebagai efek tetap. Berbeda dari CEM, tingkat kemiskinan di FEM memiliki hubungan positif signifikan terhadap UMP. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan struktur ekonomi masing-masing provinsi tertahan dalam efek tetap, sehingga hubungan yang terlihat mencerminkan dinamika perubahan dalam provinsi yang sama dari waktu ke waktu. PDRB kembali menunjukkan pengaruh positif dan signifikan, memperkuat temuan bahwa kekuatan ekonomi daerah merupakan faktor dominan dalam peningkatan upah minimum. Sementara itu, Indeks Gini dan TPT tetap tidak signifikan, menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan dan pengangguran bukan determinan utama penetapan UMP setelah mengendalikan karakteristik tetap provinsi.

Estimasi Random Effect Model (REM)

Tabel 3. Estimasi koefisien Random Effect Model (REM).

Variabel	Koefisien	Standar Error	t-statistik	probabilitas
constant	9091519	4156762	2.19	0.029
Indeks Gini	-1.48e+07	1.14e+07	-1.30	0.195
kemiskinan	-342932.4	81676.28	-4.20	0.000
PDRB	0.8205785	0.2420179	3.39	0.001
TPT	1043.142	90740	0.01	0.991

Sumber: BPS, diolah peneliti menggunakan STATA (2025).

REM memberikan hasil yang sangat mirip dengan CEM, yang menunjukkan bahwa variasi antar provinsi di pulau jawa tidak cukup besar untuk memengaruhi estimasi, sehingga perbedaan karakteristik wilayah tidak memiliki kontribusi signifikan dalam model.

Pemilihan Model Terbaik

Uji Chow

Tabel 4. Uji Chow.

Uji Efek	Statistik	Derajat Kebebasan	Probabilitas
Cross-section F	49.00	(2.17)	0.0000

Sumber: BPS, diolah peneliti menggunakan STATA (2025).

Berdasarkan Tabel 4, hasil Uji Chow menunjukkan bahwa FEM lebih tepat dibandingkan CEM, menandakan bahwa karakteristik antarprovinsi berbeda secara signifikan.

Uji Hausman

Tabel 5. Uji Hausman.

Uji Efek	Statistik	Derajat Kebebasan	Probabilitas
Cross-section Chi-square	16.19	2	0.0003

Sumber: BPS, diolah peneliti menggunakan STATA (2025).

Berdasarkan Tabel 5, hasil uji Hausman menunjukkan bahwa model REM tidak konsisten, sehingga FEM merupakan model yang paling tepat.

Uji Lagrange Multiplier

Hasil uji LM menghasilkan varians efek individu sebesar 0 dengan $\chi^2 = 0,00$ dan probabilitas = 1,0000. Dengan demikian, efek acak tidak signifikan, sehingga REM tidak direkomendasikan.

Model Terpilih

Berdasarkan keseluruhan pengujian Chow, Hausman, dan LM model terbaik yang dipilih adalah Fixed Effect Model. Dengan demikian, persamaan regresi panel yang digunakan dalam penelitian ialah:

$$UM\text{Pit} = 906.965,8 - 5.295.861\text{IndeksGini} + 362.784,4\text{Kemiskinan} + 1,033374\text{PDRB} - 21.778,94\text{TPT}$$

Model ini menunjukkan bahwa dalam konteks karakteristik provinsi yang tetap, variabel kemiskinan dan PDRB merupakan faktor penentu penting UMP, sedangkan Indeks Gini dan TPT tidak memiliki pengaruh signifikan.

Pengujian Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji Skewness–Kurtosis menunjukkan nilai $\chi^2 = 2,00$ yang lebih kecil dari χ^2 tabel (5,991), sehingga residual berdistribusi normal. Nilai probabilitas $0,3670 > 0,05$ juga memperkuat hasil tersebut.

Uji multikolinearitas (VIF)

Tabel 6. Uji Multikolinearitas (VIF).

	VIF
Indeks Gini	4.16
Presntase Kemiskinan	4.03
PDRB	1.49
TPT	1.20
Mean VIF	2.72

Sumber: BPS, diolah peneliti menggunakan STATA (2025).

Berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas, nilai VIF untuk semua variabel independen berada pada kisaran 1,20 hingga 4,16, dengan nilai rata-rata VIF sebesar 2,72. Nilai-nilai ini jauh di bawah batas kritis yang umum digunakan dalam penelitian, yaitu $VIF < 10$, sehingga semua variabel dalam model ini tetap memenuhi syarat. Hasil menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas yang serius dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil uji White maka diperoleh nilai χ^2 hitung = 5.795232, kemudian untuk memperoleh nilai χ^2 tabel, dapat dilihat pada tabel Chi-Kuadrat dengan derajat kebebasan = 4 dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$ maka diperoleh nilai χ^2 tabel = 9.487. Dengan daerah penolakan jika χ^2 hitung $> \chi^2$ tabel maka H_0 ditolak. Pada hasil uji White yang telah diperoleh terbukti bahwa χ^2 hitung $< \chi^2$ tabel maka H_0 diterima, artinya tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi pada model dilakukan menggunakan metode Wooldridge dengan meregresikan residual terhadap residual lag-1. Berdasarkan output model Fixed Effect, diperoleh nilai koefisien $L1e = -0.058567$ dengan p-value = 0.749. Karena p-value lebih besar dari 0.05, maka H_0 diterima, sehingga tidak terdapat autokorelasi pada model.

Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil peneliti menunjukkan:

H1 ditolak : Indeks Gini tidak berpengaruh signifikan terhadap UMP

H2 diterima : Tingkat Kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap UMP

H3 diterima : PDRB berpengaruh signifikan terhadap UMP

H4 ditolak : TPT tidak berpengaruh signifikan terhadap UMP

Kesesuaian dengan Peneliti Sebelumnya

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap UMP konsisten dengan penelitian Rahmadeni & Wulandari (2017) yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah merupakan detreminan utama kebijakan upah minimum. Sementara itu, ketidaksignifikanan Indeks Gini sejalan dengan temuan Pradipta & Dewi (2020)

yang menyatakan bahwa ketimpangan bukan faktor langsung dalam penetapan UMP. Perbedaan arah pengaruh kemiskinan antara CEM dan FEM juga selaras dengan penelitian yang menunjukkan bahwa dinamika sosial ekonomi internal wilayah dapat memengaruhi arah hubungan antara variabel sosial dan kebijakan upah.

Impikasi Penelitian

Implikasi Teoritis

Penelitian ini memperkuat teori bahwa kebijakan upah minimum lebih sensitif terhadap indikator ekonomi makro (PDRB) dibanding ketimpangan pendapatan. Hasil ini memberikan dukungan empiris bahwa penetapan UMP lebih mencerminkan kondisi ekonomi riil dibandingkan distribusi pendapatan.

Implikasi Praktis

Pemerintah provinsi perlu lebih mempertimbangkan kondisi kemiskinan dan PDRB dalam menentukan UMP agar kebijakan dapat mendukung daya beli tanpa menekan pasar tenaga kerja. Ketidaksignifikanan TPT mengindikasikan bahwa upah minimum selama ini tidak mengikuti dinamika pasar tenaga kerja, sehingga perlu evaluasi untuk memastikan efektivitas kebijakan upah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) di tiga provinsi industri di Pulau Jawa lebih dipengaruhi oleh dinamika ekonomi makro, terutama melalui pergerakan PDRB dan tingkat pengangguran terbuka. Sementara itu, ketimpangan pendapatan dan tingkat kemiskinan belum menunjukkan peran kuat dalam memengaruhi UMP, sehingga mengindikasikan bahwa kebijakan upah minimum belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan. Temuan ini menegaskan bahwa UMP tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan bagi pekerja berupah rendah, tetapi juga mencerminkan kondisi dan stabilitas ekonomi daerah.

Secara praktis, hasil penelitian memberikan rekomendasi agar pemerintah provinsi mengintegrasikan indikator kesejahteraan secara lebih komprehensif dalam proses penetapan UMP sehingga kebijakan yang dihasilkan mampu menjaga daya beli sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan wilayah dan jumlah variabel yang digunakan, sehingga generalisasi hasil perlu dilakukan dengan hati-hati. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memasukkan variabel tambahan seperti produktivitas tenaga kerja, inflasi, dan investasi, serta menerapkan model ekonometrika lanjutan guna

memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak jangka panjang kebijakan upah minimum.

DAFTAR REFERENSI

- Barro, R. J. (1999). *Inequality and growth in a panel of countries*. Harvard University.
- Bernstein, J., Campolieti, M., Cardoso, A. R., Couch, K., Cunningham, W., Karageorgiou, L., Leigh, A., Maloney, W., Michl, T., Reich, M., Sabia, J., Schiller, B., Skedinger, P., Wessels, W., & Wise, D. (2006). *Minimum wages and employment: A review of evidence from the new minimum wage research*.
- Cunningham, W. (n.d.). *Minimum wages and social policy: Lessons from developing countries*.
- García-Gómez, C., Pérez, A., & Prieto-Alaiz, M. (2025). The risk of clustering of deprivations in Spain: A tale of two crises. *Applied Economic Analysis*, 33(97), 53–75. <https://doi.org/10.1108/AEA-03-2024-0113>
- Gini, C. (1921). Measurement of inequality of incomes. *The Economic Journal*, 31(121), 124–126. <https://doi.org/10.2307/2223319>
- Ilmiah, J. (2015). Analisis dampak kebijakan upah minimum.
- International Labour Organization. (2009). *18th International Conference of Labour Statisticians: The concepts of employment and unemployment as set out by the 13th ICLS—Is there a need for revision?*
- Jimenez, E. (2015). Editor's note. *World Bank Research Observer*, 1–2. <https://doi.org/10.1093/wbro/lkv003>
- Lee, W., & Roemer, J. E. (2005). The rise and fall of unionised labour markets: A political economy approach. *The Economic Journal*, 115(500), 28–67. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2004.00959.x>
- Lorenz, M. O. (1905). Methods of measuring the concentration of wealth. *Publications of the American Statistical Association*, 9(70), 209–219. <https://doi.org/10.1080/15225437.1905.10503443>
- Muslim, M. R. (2014). Pengangguran terbuka dan determinannya. *15*, 171–181.
- Perwira, D., & Stokes, K. (2001). *Wage and employment effects of minimum wage policy in the Indonesian urban labor market*. SMERU Research Institute.
- Plosser, C. I., & Schwert, G. W. (1979). Money, income, and sunspots: Measuring economic relationships. *Journal of Monetary Economics*, 15, 179. [https://doi.org/10.1016/0167-2231\(79\)90009-5](https://doi.org/10.1016/0167-2231(79)90009-5)
- Priseptian, L., & Primandhana, W. P. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan. *Jurnal Forum Ekonomi*, 24(1), 45–53. <https://doi.org/10.30872/jfor.v24i1.10362>
- Rohmah, Z., & Sastiono, P. (2021). Pengaruh kebijakan peningkatan upah minimum terhadap ketimpangan upah (Studi kasus provinsi-provinsi di Jawa). *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 21(2). <https://doi.org/10.21002/jepi.2021.15>
- Solow, R. M. (1956). A contribution to the theory of economic growth. *Quarterly Journal of Economics*, 70(1), 65–94. <https://doi.org/10.2307/1884513>

- Stone, R. (2019). Beyond GDP: Measuring what counts for economic and social performance. *Journal of Social and Economic Performance*, 12(5), 172–180. <https://doi.org/10.24833/2071-8160-2019-5-68-172-180>
- Wihardja, M. M., & Cunningham, W. (2021). *Pathways to middle-class jobs in Indonesia*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/35848>
- Wulandari, N. (2017). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi pada kota metropolitan di Indonesia dengan menggunakan analisis data panel. 3(2), 34–42.